

**ASAS TUNGGA PANCASILA DAN KONFLIK INTERNAL
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM: ANALISIS KONFLIK DAN
FRAGMENTASI ORGANISASI 1983–1986**



M. Fikry Yustiawan

1403622062

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2026**

ABSTRAK

M. Fikry Yustiawan. *Asas Tunggal Pancasila dan Konflik Internal Himpunan Mahasiswa Islam: Analisis Konflik dan Fragmentasi Organisasi 1983–1986*. **Skripsi**. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2026.

Kebijakan Asas Tunggal Pancasila yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengharuskan seluruh organisasi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sejak 1947 berasaskan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konflik internal HMI berkembang dari perbedaan sikap terhadap kebijakan tersebut pada periode 1983–1986 hingga menghasilkan fragmentasi organisasi yang melahirkan HMI DIPO dan HMI MPO. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan sumber primer dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan dokumen organisasi. Teori konflik Ralf Dahrendorf dan teori faksionalisme digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons HMI bersifat majemuk, ditentukan oleh faktor ideologis, organisatoris, dan politis sekaligus. Konflik berkembang secara bertahap: dari perbedaan sikap pada Kongres XV Medan (1983), polarisasi pasca-SK MPK II (1985), krisis legitimasi yang melumpuhkan mekanisme penyelesaian internal, hingga fragmentasi terbuka pada Kongres XVI Padang (1986). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fragmentasi HMI bukan peristiwa tunggal yang tiba-tiba, melainkan kristalisasi dari proses konflik bertahap di mana tekanan eksternal Orde Baru berinteraksi dengan kerentanan struktural internal organisasi sehingga mempersempit ruang rekonsiliasi hingga tidak tersisa.

Kata Kunci: Asas Tunggal Pancasila, Fragmentasi Organisasi, HMI, Konflik Internal Organisasi, Orde Baru

ABSTRACT

M. Fikry Yustiawan. *The Pancasila Sole Principle and Internal Conflict within the Islamic Association of University Students (HMI): An Analysis of Conflict and Organizational Fragmentation, 1983–1986*. **Thesis**. Jakarta: History Education Study Program, Faculty of Social Sciences and Law, State University of Jakarta, 2026.

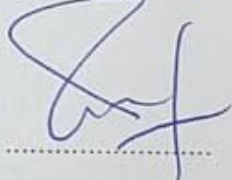
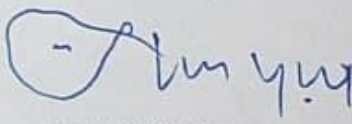
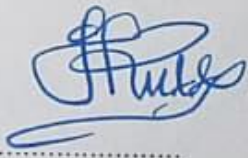
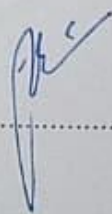
The Pancasila Sole Principle Policy, established through MPR Decree No. II/MPR/1983 and Law No. 8 of 1985 on Mass Organizations, required all organizations, including the Islamic Students' Association (HMI), which since its founding in 1947 had maintained Islam as its organizational basis to adopt Pancasila as their sole principle. This study analyzes how HMI's internal conflict evolved from divergent attitudes toward the policy during 1983–1986 into organizational fragmentation, resulting in the formation of HMI DIPO and HMI MPO. The study employs historical research methods comprising heuristic inquiry, source criticism, interpretation, and historiography, drawing on primary sources from the National Archives of Indonesia and organizational documents. Ralf Dahrendorf's conflict theory and factionalism theory serve as analytical tools. The study finds that HMI's responses were heterogeneous, shaped by ideological, organizational, and political factors. The conflict unfolded incrementally: from divergent attitudes at the XV Congress in Medan (1983), through organizational polarization following the MPK II Decree (1985) and a legitimacy crisis that eroded all internal resolution mechanisms, to open fragmentation at the XVI Congress in Padang (1986). The study concludes that HMI's fragmentation was not a sudden rupture but the crystallization of a protracted conflict process, in which New Order state pressure interacted with the organization's internal structural vulnerabilities, progressively foreclosing any possibility of reconciliation.

Keywords: Pancasila Sole Principle Policy, Islamic Students' Association (HMI), Organizational Fragmentation, Organizational Internal Conflict, New Order

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Jakarta


Firdaus Wajdi, S.Th.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198107182008011016

No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<u>Muhammad Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197601302005011001 Ketua		23/7/2026
2.	<u>Dr. Nur Aeni Marta, S.S., M.Hum.</u> NIP. 197109222001122001 Penguji Ahli I		23/7/2026
3.	<u>Dr. Nurzengky Ibrahim, M.M.</u> NIP. 196110051987031005 Penguji Ahli II		21/7/2026
4.	<u>Dr. M. Fakhruddin, M.Si.</u> NIP. 196505081990031005 Pembimbing I		23/7/2026
5.	<u>Dr. Abrar, M.Hum.</u> NIP. 196110281987031004 Pembimbing II		27/7/2026

Tanggal Lulus: 03 Agustus 2026

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta:

Nama : M. Fikry Yustiawan
NIM : 1403622062
Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Asas Tunggal Pancasila Dan Konflik Internal Himpunan Mahasiswa Islam: Analisis Konflik Dan Fragmentasi Organisasi 1983–1986”** adalah:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya, sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni hasil gagasan dan rumusan penelitian saya sendiri. Tanpa bantuan dari orang lain, kecuali bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun dipublikasikan ke orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala sanksi akademik sesuai dengan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 13 Juli 2026



M. Fikry Yustiawan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN
Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: (021) 4894221
Laman: lib.unj.ac.id.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fikry Yustiawan
NIM : 1403622062
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Hukum/S1 Pendidikan Sejarah
Alamat Surel : fikryyustiawan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas Karya Ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-Lain (.....)

yang berjudul: **Asas Tunggal Pancasila Dan Konflik Internal Himpunan Mahasiswa Islam: Analisis Konflik Dan Fragmentasi Organisasi 1983–1986.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, dan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Juli 2026

M. Fikry Yustiawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami.” (Q.S Al-Ankabut: 69)

“Mungkin kita sampai, mungkin saja tidak. Tugas kita hanyalah berjalan”

Sambutlah – The Jeblogs

“Dimanapun kau berkiprah tak ada masalah, yang penting semangat keislaman dan keindonesiaan itu yang harus kau pegang teguh.”

Prof. Drs. Lafran Pane

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan tanpa batas dalam setiap detik kehidupan saya. Kepada keluarga serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan masukan, arahan serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini menjadi wujud dari rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mewarnai setiap langkah saya didalam perjalanan studi saya. Yakin usaha sampai.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Asas Tunggal Pancasila dan Konflik Internal Himpunan Mahasiswa Islam: Analisis Konflik dan Fragmentasi Organisasi 1983–1986”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman terang benderang hari ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwasannya dalam perjalanan penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan serta kekuatan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk penghargaan atas segala perhatian, kesabaran dan kontribusi yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, serta ibu Nur'aeni Marta, S.S., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, pengalaman serta nilai-nilai akademik selama masa perkuliahan. Segala ilmu dan pembelajaran yang diberikan menjadi bekal penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Fakhrudin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,

arahan, kritik serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abrar, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketelitian dan perhatian dari kedua dosen pembimbing telah membantu penulis dalam memperbaiki isi, struktur serta ketajaman analisis penelitian. Tidak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hasmi Yanuardi, S.S., M.Hum., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan masukan serta kritik demi memperbaiki skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan juga kepada Ibu Dr. Nur'aeni Marta, S.S., M.Hum., selaku dosen Penguji Ahli yang juga memberikan kritik serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Dr. Nurzengky Ibrahim, M.M., sebagai Dosen Anggota Penguji yang juga memberikan arahan serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak M. Fery Yusrizal dan Ibu Titin Susanti yang telah memberikan banyak sekali kasih sayang, pengorbanan, doa dan dukungan baik dalam bentuk materil maupun imateril. Kedua orang yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan dan melanjutkan studi dan skripsi ini sebaik-baiknya. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudari penulis, Tazkia Yustie Syalsabina atas dukungan dan doa selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran yang telah memberikan dukungan berupa beasiswa demi kelangsungan pendidikan penulis. Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan kesempatan serta bantuan terkait akses kepada penulis untuk memperoleh sumber-sumber yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman yang tergabung dalam grup Fix Banget yaitu Khafidz, Rifqi, Hizb Bil, Bintang, Abdul, Azka, Zidan, Akmal dan Luthfi yang merupakan kawan seperjuangan di Madrasah

Aliyah atas motivasi dan dukungan sejak penulis duduk di bangku sekolah. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kuliah yang tergabung didalam grup “Mafia” yaitu Obet, Addis, Alvin, Nibras, Khaliful, Hyman, Lazuardi, Iltar dan Julang yang telah memberikan dukungan, hiburan, semangat, serta kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tidak lupa penulis ungkapkan kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat Universitas Negeri Jakarta umumnya, dan khususnya kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ yang telah memberikan banyak sekali pengalaman serta pelajaran hidup setidaknya selama penulis mengemban pendidikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seorang perempuan yang menemani penulis setidaknya sejak semester 3 hingga detik ini ketika penulis sedang mengetik tulisan ini, Viani Grace Mellisa Tiurma selaku teman terdekat yang telah memberikan dukungan, semangat, kebersamaan dan menjadi salah satu motivasi terbesar selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Asas Tunggal Pancasila dan Konflik Internal Himpunan Mahasiswa Islam: Analisis Konflik dan Fragmentasi Organisasi 1983–1986” ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ini. Semoga semua doa, bantuan, dukungan dan segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Penulis Berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya dalam pengembangan kajian sejarah organisasi mahasiswa Islam dan studi kebijakan pada masa Orde Baru.

Jakarta, 29 Juni 2026

M. Fikry Yustiawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Analisis	7
E. Metode dan Sumber.....	8
BAB II.....	10
NEGARA, ASAS TUNGGAL, DAN POSISI HMI DALAM POLITIK ORDE BARU.....	10
A. Relasi Negara dan Organisasi Islam pada Masa Orde Baru.....	10
B. Kebijakan Asas Tunggal Pancasila	19
C. Respons Awal HMI terhadap Asas Tunggal	30

BAB III.....	42
TRANSFORMASI KONFLIK INTERNAL HMI (1983–1986).....	42
A. Munculnya Perbedaan Sikap terhadap Asas Tunggal	42
B. Polarisasi Internal HMI	52
C. Eskalasi Konflik dan Krisis Legitimasi Organisasi.....	62
BAB IV	73
FAKSIONALISASI DAN FRAGMENTASI ORGANISASI: DIPO DAN MPO	73
A. Krisis Legitimasi Menjelang Kongres XVI.....	73
B. Fragmentasi Organisasi dan Lahirnya DIPO dan MPO	82
C. Lahirnya HMI DIPO dan HMI MPO Sebagai Hasil Fragmentasi Organisasi.....	91
BAB V.....	102
KESIMPULAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	113
RIWAYAT HIDUP.....	138

DAFTAR ISTILAH

- Arsip** : Kumpulan dokumen atau rekaman yang memiliki nilai historis dan disimpan secara sistematis sebagai sumber penelitian sejarah.
- Dekrit Presiden** : Keputusan presiden yang memiliki kekuatan hukum tertinggi; dalam penelitian ini merujuk pada Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.
- Deskriptif-naratif** : Pendekatan penulisan sejarah yang menyajikan fakta dan analisis dalam bentuk narasi yang mengalir dan analitis.
- Heuristik** : Tahap pertama metode sejarah berupa pengumpulan dan pelacakan sumber-sumber yang relevan, baik sumber primer maupun sekunder.
- Historiografi** : Dalam metode sejarah, merupakan tahap terakhir berupa penulisan hasil penelitian menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; secara lebih luas juga berarti ilmu tentang penulisan sejarah.
- Historiografi Analitis** : Penulisan sejarah yang tidak sekadar menyusun kronologi peristiwa, melainkan menganalisis sebab-akibat, pola, dan struktur yang melatarbelakanginya.
- Interpretasi** : Tahap dalam metode sejarah di mana peneliti menafsirkan dan menyimpulkan fakta-fakta yang telah diverifikasi melalui kritik sumber.
- Kausalitas** : Hubungan sebab-akibat antara peristiwa-peristiwa sejarah; prinsip dasar dalam analisis historis bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab yang dapat diidentifikasi.

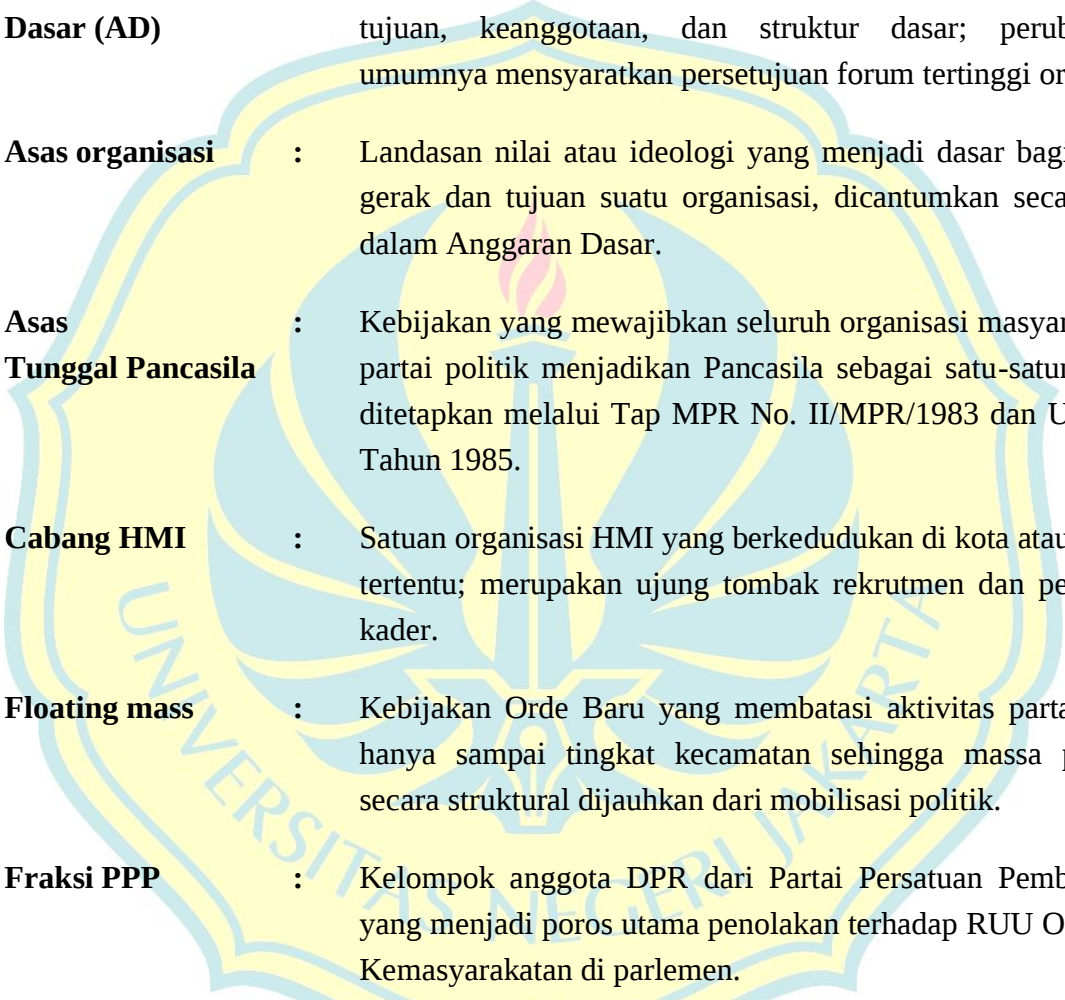
- Khittah** : Garis perjuangan atau pedoman dasar suatu organisasi; merujuk pada khittah 1926 NU yang menyatakan kembalinya NU ke peran sosial-keagamaan dan meninggalkan politik praktis.
- Kritik eksternal** : Pengujian terhadap keaslian (otentisitas) suatu sumber sejarah dari segi fisik, seperti bahan, tulisan, cap, dan kondisi dokumen.
- Kritik internal** : Pengujian terhadap kredibilitas dan keandalan isi suatu sumber sejarah untuk menilai apakah informasi yang dikandungnya dapat dipercaya.
- Kritik sumber** : Tahap dalam metode sejarah di mana sumber-sumber yang dikumpulkan diuji keaslian dan keakuratannya melalui kritik eksternal dan internal.
- Narasi sejarah** : Penyajian fakta dan analisis sejarah dalam bentuk cerita yang runtut dan berkesinambungan sebagai hasil akhir proses historiografi.
- Periodisasi** : Pembagian waktu dalam sejarah berdasarkan karakteristik atau peristiwa tertentu; dalam penelitian ini mencakup periode 1983–1986.
- Sejarah lisan** : Metode pengumpulan sumber sejarah melalui wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah untuk mendapatkan kesaksian langsung tentang peristiwa masa lampau.
- Sejarah organisasi** : Cabang kajian sejarah yang berfokus pada pertumbuhan, perkembangan, dan krisis yang dialami oleh suatu organisasi dalam konteks historisnya.
- Sejarah politik** : Cabang kajian sejarah yang memusatkan perhatian pada peristiwa, struktur kekuasaan, kebijakan, dan perubahan dalam kehidupan politik suatu masyarakat atau negara.
- Sumber primer** : Sumber sejarah yang dibuat pada masa atau dekat dengan peristiwa yang diteliti, seperti arsip, dokumen resmi, surat kabar sezaman, dan catatan organisasi.

- Sumber sekunder** : Sumber sejarah yang dibuat setelah peristiwa berlangsung dan didasarkan pada sumber primer, seperti buku akademik, artikel jurnal, dan karya ilmiah.
- Akomodasi** : Strategi adaptasi organisasi terhadap tekanan eksternal dengan cara menyesuaikan diri tanpa mengubah tujuan dasarnya secara fundamental.
- Ambiguitas Struktural** : Kondisi di mana posisi suatu organisasi atau aktor berada di antara dua orientasi yang sulit didamaikan, sehingga menciptakan kerentanan terhadap konflik.
- Conflict group** : Istilah Dahrendorf untuk kelompok yang telah terorganisir secara penuh dan siap berkonflik secara terbuka guna mengubah distribusi otoritas dalam suatu struktur.
- Depolitisasi** : Proses yang secara sistematis menjauhkan organisasi masyarakat dari arena dan aktivitas politik praktis, sebagaimana dijalankan Orde Baru terhadap berbagai organisasi termasuk HMI.
- Distribusi otoritas** : Cara kekuasaan dan wewenang dibagi di antara posisi-posisi berbeda dalam suatu organisasi; merupakan konsep sentral dalam teori konflik Dahrendorf.
- Eskalasi konflik** : Proses meningkatnya intensitas dan jangkauan suatu konflik dari satu tahapan ke tahapan berikutnya yang lebih besar dan lebih sulit dikendalikan.
- Faksionalisme** : Teori yang menjelaskan proses pembentukan dan persaingan kelompok-kelompok (faksi) dalam suatu organisasi berdasarkan perbedaan kepentingan, orientasi, dan jaringan dukungan.
- Faksi** : Kelompok di dalam suatu organisasi yang memiliki kepentingan, orientasi, dan jaringan dukungan tersendiri serta bersaing dengan kelompok lain untuk memengaruhi arah organisasi.

- Fragmentasi Organisasi** : Proses perpecahan suatu organisasi menjadi dua atau lebih entitas yang terpisah akibat konflik internal yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada.
- Interest group** : Istilah Dahrendorf untuk kelompok yang sudah memiliki kesadaran bersama tentang kepentingannya dan mampu mengekspresikannya melalui tindakan kolektif yang terkoordinasi.
- Konflik laten** : Istilah Dahrendorf untuk ketegangan atau pertentangan yang belum termanifestasi secara terbuka; masih tersembunyi di balik ketidakpuasan yang belum terorganisir.
- Konflik manifest** : Konflik yang sudah terbuka dan terorganisir, di mana kelompok-kelompok yang berlawanan secara aktif bersaing untuk menguasai struktur otoritas.
- Kooptasi** : Strategi kekuasaan yang menyerap tokoh-tokoh potensial oposisi ke dalam struktur kekuasaan yang ada sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk menentang.
- Korporatisme Negara** : Sistem di mana negara membentuk dan mengontrol organisasi-organisasi masyarakat, memberikan monopoli representasi kepada satu organisasi untuk setiap sektor, dan menempatkannya di bawah pengaruh langsung negara.
- Krisis legitimasi** : Kondisi di mana otoritas suatu kepemimpinan atau keputusan tidak lagi diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang seharusnya terikat olehnya.
- Legitimasi** : Pengakuan dan penerimaan oleh anggota atau konstituen bahwa suatu kepemimpinan, keputusan, atau mekanisme organisasi berhak dipatuhi.
- Legitimasi Procedural** : Keabsahan suatu keputusan yang didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur formal yang berlaku dalam organisasi.



Legitimasi Substantif	:	Keabsahan suatu keputusan yang didasarkan pada penerimaan terhadap kandungan atau nilai dari keputusan tersebut, bukan hanya pada prosedurnya.
Musyawarah Mufakat	:	Mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus yang mensyaratkan kesepakatan dari semua pihak; menjadi mekanisme utama yang gagal diterapkan dalam Kongres XVI.
Narasi legitimasi	:	Konstruksi cerita yang dibangun suatu kelompok untuk memvalidasi klaim kepemimpinan atau keabsahannya di hadapan anggota dan publik.
Patronase	:	Sistem di mana kekuasaan mendistribusikan sumber daya, jabatan, atau perlindungan kepada individu atau kelompok yang bersedia memberikan dukungan dan kesetiaan.
Polarisasi	:	Proses meningkatnya jarak antara dua kelompok yang berlawanan dalam hal posisi, identitas, dan cara mendefinisikan pihak lain sehingga kompromi menjadi semakin sulit.
Politisasi Prosedur	:	Penggunaan aturan dan mekanisme formal bukan sebagai instrumen netral untuk mencapai keputusan yang sah, melainkan sebagai senjata taktis dalam pertarungan melawan pihak lawan.
Post-conflict Group	:	Tahap dalam teori Dahrendorf setelah pemisahan conflict groups, di mana masing-masing kelompok membangun identitas dan struktur otonom sebagai entitas yang terpisah.
Quasi group	:	Istilah Dahrendorf untuk agregat individu yang memiliki kepentingan laten yang sama namun belum terorganisir secara sadar sebagai kelompok yang kohesif.
Resistensi	:	Penolakan atau perlawanan terhadap tekanan atau kebijakan yang dianggap tidak sah atau merugikan kepentingan suatu kelompok.



Teori konflik	:	Kerangka teoritis yang memandang konflik sebagai bagian melekat dalam kehidupan sosial akibat distribusi otoritas yang tidak merata; dalam penelitian ini mengacu pada teori Ralf Dahrendorf.
Anggaran Dasar (AD)	:	Dokumen konstitutif organisasi yang memuat nama, asas, tujuan, keanggotaan, dan struktur dasar; perubahannya umumnya mensyaratkan persetujuan forum tertinggi organisasi.
Asas organisasi	:	Landasan nilai atau ideologi yang menjadi dasar bagi seluruh gerak dan tujuan suatu organisasi, dicantumkan secara resmi dalam Anggaran Dasar.
Asas Tunggal Pancasila	:	Kebijakan yang mewajibkan seluruh organisasi masyarakat dan partai politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, ditetapkan melalui Tap MPR No. II/MPR/1983 dan UU No. 8 Tahun 1985.
Cabang HMI	:	Satuan organisasi HMI yang berkedudukan di kota atau wilayah tertentu; merupakan ujung tombak rekrutmen dan pembinaan kader.
Floating mass	:	Kebijakan Orde Baru yang membatasi aktivitas partai politik hanya sampai tingkat kecamatan sehingga massa pedesaan secara struktural dijauhkan dari mobilisasi politik.
Fraksi PPP	:	Kelompok anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi poros utama penolakan terhadap RUU Organisasi Kemasyarakatan di parlemen.
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)	:	Ketetapan MPR yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional; Tap MPR No. II/MPR/1983 yang menjadi landasan konstitusional Asas Tunggal merupakan bagian dari GBHN.

- HMI DIPO** : Kepengurusan HMI yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal pasca Kongres XVI Padang (1986); nama "DIPO" merujuk pada Jalan Diponegoro, alamat kantor PB HMI yang dikuasai kelompok ini.
- HMI MPO** : Kelompok HMI yang menolak penggantian asas Islam dan mendirikan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) sebagai bentuk resistensi pasca Kongres XVI Padang (1986).
- KAHMI** : Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam; wadah yang menghimpun mantan kader HMI; dalam penelitian ini berperan penting sebagai jaringan yang menghubungkan HMI dengan struktur patronase negara.
- Kader** : Anggota aktif suatu organisasi yang telah mengikuti pelatihan dan pembinaan ideologis; dalam HMI mengacu pada anggota yang sudah menyelesaikan latihan dasar kepemimpinan.
- Kongres** : Forum tertinggi dalam hierarki organisasi HMI yang berwenang menetapkan kebijakan dasar, memilih kepengurusan, dan mengambil keputusan yang mengikat seluruh organisasi.
- Kongres XV Medan (1983)** : Kongres HMI yang berlangsung 22–29 Mei 1983 di Medan; menjadi arena pertama di mana isu Asas Tunggal diperdebatkan secara terbuka dan menghasilkan keputusan mempertahankan asas Islam.
- Kongres XVI Padang (1986)** : Kongres HMI yang berlangsung Maret 1986 di Padang; menjadi titik puncak konflik yang ditandai oleh walkout dan pembentukan forum paralel, sehingga mengkonkretkan fragmentasi organisasi.
- Majelis Pekerja Kongres (MPK)** : Forum dalam hierarki organisasi HMI yang berkedudukan di antara kongres dan pengurus besar; berwenang mengambil keputusan strategis di antara dua kongres.
- Majelis Penyelamat Organisasi (MPO)** : Forum yang dibentuk oleh kelompok penolak asas tunggal pasca Kongres XVI Padang sebagai wadah perlawanan; kemudian berkembang menjadi HMI MPO.



Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP)	:	Dokumen ideologis HMI yang dirumuskan Nurcholish Madjid pada 1969; menempatkan Islam sebagai epistemologi gerakan dan landasan nilai seluruh aktivitas organisasi.
NKK/BKK	:	Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan; kebijakan Orde Baru (SK Mendikbud No. 0156/U/1978) yang membubarkan Dewan Mahasiswa dan melarang aktivitas politik di kampus.
Orde Baru	:	Rezim pemerintahan di bawah Soeharto (1966–1998) yang ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, depolitisasi masyarakat sipil, dan pertumbuhan ekonomi di bawah kontrol negara yang ketat.
Ormas	:	Organisasi Kemasyarakatan; sebutan untuk organisasi non-pemerintah di bidang sosial, keagamaan, kepemudaan, atau kemahasiswaan; diatur dalam UU No. 8 Tahun 1985.
Pancasila	:	Dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila; dalam penelitian ini menjadi pusat perdebatan tentang asas organisasi HMI pada periode 1983–1986.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	:	Partai Islam yang terbentuk dari fusi empat partai Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) pada 1973 atas tekanan pemerintah Orde Baru; menjadi satu-satunya wadah politik Islam yang diakui.
Pengurus Besar (PB)	:	Badan kepemimpinan tertinggi HMI di tingkat nasional yang bertugas menjalankan keputusan kongres dan mengelola organisasi secara operasional.
Politisasi Islam	:	Penggunaan identitas dan nilai-nilai Islam sebagai basis mobilisasi politik; dipandang Orde Baru sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional yang harus dibatasi.
Surat Keputusan MPK II	:	SK Nomor 1/KPTS/MPK-2/07/1405 tertanggal 4 April 1985; keputusan MPK II HMI yang menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi menggantikan Islam; menjadi titik eskalasi konflik.

- UU No. 8 Tahun 1985** : Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mewajibkan seluruh ormas berasaskan Pancasila; disahkan 17 Juni 1985; menjadi instrumen hukum utama penerapan Asas Tunggal.
- Walkout** : Tindakan meninggalkan ruang sidang secara kolektif sebagai bentuk penolakan terhadap proses yang dianggap tidak sah; dalam Kongres XVI menjadi tindakan yang memicu terbentuknya forum paralel.



DAFTAR SINGKATAN



ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia (kini TNI AU)
BKIN	: Badan Koordinasi Intelijen Negara
BKK	: Badan Koordinasi Kemahasiswaan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DIPO	: Diponegoro (nama yang merujuk pada Jalan Diponegoro, alamat kantor PB HMI kelompok penerima asas tunggal)
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Golkar	: Golongan Karya
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KAHMI	: Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
MPK	: Majelis Pekerja Kongres
MPO	: Majelis Penyelamat Organisasi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTQ	: Musabaqah Tilawatil Quran
NU	: Nahdlatul Ulama
P3PK	: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pedesaan dan Kawasan (UGM)
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PB	: Pengurus Besar
PB HMI	: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia



RUU	: Rancangan Undang-Undang
SK	: Surat Keputusan
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UNJ	: Universitas Negeri Jakarta
AD/ART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
NDP	: Nilai Dasar Perjuangan
NKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus
NKK/BKK	: Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan
Tap MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
eds.	: editors (editor/penyunting, digunakan dalam sitasi)
et al.	: et alii (dan kawan-kawan, digunakan dalam sitasi)
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
hlm.	: halaman
No.	: Nomor
Q.S	: Al-Quran Surah